

LAPORAN KEGIATAN PPL
LOKASI DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA

JUDUL:
IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR DI SMA N
9 DAN 10 YOGYAKARTA TAHUN 2016

Dosen Pembimbing Lapangan:

Ariefa Efianingrum, M.Si.



Disusun oleh:

Agus Setyani S

13110241061

PROGRAM STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2016

LEMBAR PENGESAHAN

Pengesahan laporan program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta:

Nama : Agus Setyani S.
NIM : 13110241061
Prodi : Kebijakan Pendidikan
Jurusan : Filsafat dan Sosiologi Pendidikan
Fakultas : Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta
Telp : 089601443511

Telah melaksanakan PPL dan menyusun laporan penelitian PPL yang berjudul **“Implementasi Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 9 dan SMA Negeri 10 Yogyakarta”** yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli s/d 15 September 2016.

Yogyakarta, 3 Oktober 2016

Menyetujui,



Dosen Pembimbing Lapangan

Ariefa Efaningrum, M.Si
NIP. 19740411 199802 2001

Mengetahui,

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Yogyakarta



KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karna atas rahmat dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan penulisan laporan Praktik Pengalaman Lapangan yang berjudul “Implementasi Program Indonesia Pintar di SMAN 9 dan SMAN 10 Yogyakarta. Penelitian ini berisi deskripsi mengenai proses pelaksanaan Program Indonesia Pintar dalam satuan pendidikan. Dalam penelitian ini dibahas mengenai sumber daya pendukung pelaksanaan PIP, strategi yang digunakan serta faktor pendukung dan penghambat PIP.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang telah mengizinkan mahasiswa untuk melaksanakan PPL di bidang UPT JPD. Ketua bidang UPT JPD dan staff yang telah memberikan arahan, bimbingan serta ilmu yang baru bagi mahasiswa. DPL yang telah memberikan bimbingan dan arahan dari penyusunan proposal sampai pelaksanaan PPL. Tak lupa penyusun juga mengucapkan terimakasih kepada teman-teman kelompok atas kerjasamanya dalam pelaksanaan program PPL.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk semua pihak baik dari penyusun, Dinas Pendidikan, maupun satuan pendidikan yang dijadikan tempat penelitian. Penyusun juga memohon maaf apabila dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kesalahan baik dari segi penulisan maupun bahasa yang digunakan.

Terimakasih.

Yogyakarta, Oktober 2016

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Analisis Situasi.....	1
B. Perumusan Program Kegiatan dan Rancangan Kegiatan PPL.....	2
BAB II PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL.....	4
A. Persiapan	4
B. Pelaksanaan PPL	11
C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi	11
BAB III PENUTUP	18
A. Kesimpulan.....	18
B. Rekomendasi	19
DAFTAR PUSTAKA	20
LAMPIRAN	

IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR DI SMA N 9 DAN 10 YOGYAKARTA

Oleh:

Agus Setyani S

ABSTRAK

Program PPL adalah program kegiatan praktik pengalaman lapangan. Program tersebut merupakan kegiatan yang diarahkan ke pelatihan pengalaman. Tujuan yang ingin dicapai yaitu mengembangkan kompetensi mahasiswa sebagai tenaga kependidikan. Di dalam analisis situasi dijelaskan bahwa kegiatan ini berlangsung di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang berada di Jl. Hayamwuruk, No. 11 Yogyakarta dan terbagi dalam bidang UPT JPD. Dalam rumusan program PPL yaitu membuat penelitian tentang implementasi Program Indonesia Pintar di SMA N 9 dan 10 Yogyakarta. Tujuan dari program PPL ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SMA N 9 dan 10 Yogyakarta.

Kegiatan PPL ini diawali dengan melakukan observasi, hasil observasi tersebut kemudian digunakan untuk merancang dan menyusun program PPL. Dari hasil observasi, permasalahan yang dijadikan penelitian adalah implementasi Program Indonesia Pintar melalui KIP di SMA. Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan wawancara dan dokumentasi. Kegiatan lain yang dilakukan di bidang adalah menyesuaikan dengan kondisi dan situasi di bidang.

Hasil penelitian individu bahwa PIP melalui KIP dilaksanakan melalui dua jalur yaitu jalur kartu dan non kartu. KIP diperoleh melalui data yang dimiliki BPS saat sensus penduduk. PIP disosialisasikan kepada masyarakat dan sekolah pada awal tahun 2015. Mekanisme pengusulan adalah bagi siswa yang memiliki KIP membawa fotocopi KIP dan KK ke sekolah sedangkan bagi siswa yang tidak mempunyai KIP dapat mengusulkan dengan membawa KPS/KKS dilampiri dengan Surat Keterangan Tidak Mampu ke sekolah, selanjutnya sekolah akan mengentry data siswa dalam sistem dapodik. Alur yang kedua adalah mekanisme penetapan penerima, Kemendikbud akan menetapkan siswa penerima PIP dan mengeluarkan SK calon penerima PIP, kemudian Kemendikbud menginformasikan kepada Dinas mengenai daftar penerima PIP dilampiri SK penerima. Dinas menginformasikan kepada sekolah untuk pengambilan dana. Selanjutnya siswa mengambil dana di bank penyalur dengan membawa surat keterangan dari sekolah dan akte kelahiran atau dokumen pribadi yang lain. Faktor pendukung pelaksanaan PIP adalah adanya komunikasi, kerjasama dan sikap proaktif, adanya sumber gaya manusia yang terampil. Ketersediaan dana. Sedangkan faktor penghambat adalah keterlambatan pendistribusian kartu dan kurangnya validitas data penerima PIP.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Indonesia Pintar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Sebelum melakukan PPL mahasiswa diberi kesempatan untuk observasi selama satu minggu dibidang masing-masing. Mahasiswa ditempatkan di UPT JPD (Jaminan Pendidikan Daerah) selama observasi tersebut kami mengamati aktivitas karyawan dan juga indikator yang ada dalam pedoman observasi. UPT JPD merupakan satu-satunya yang ada di Kota Yogyakarta untuk menangani masalah pendidikan terutama masalah pendanaan pendidikan. Jaminan Pendidikan Daerah ini diselenggarakan mulai tahun 2007 sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2007 tentang pemberian Jaminan Pendidikan Daerah. Tujuan Jaminan Pendidikan Daerah antara lain adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia kota Yogyakarta khususnya bagi peserta didik yang berdomisili di kota Yogyakarta sehingga kompetitif memasuki sekolah yang berkualitas
2. Menuntaskan wajib belajar 12 tahun;
3. Menekan kesenjangan output antar sekolah di kota Yogyakarta
4. Memperluas akses pendidikan bagi penduduk miskin di kota Yogyakarta
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan bidang masyarakat.

Struktur organisasi di JPD masih mengikuti dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Kepala Bidang UPT JPD adalah Dra.Suryatmi dengan Ka. Tu Agus Trimadi, S.IP., M.Acc. dengan jumlah karyawan empat orang yaitu Sri Kusnoati, Rini Kadarsih, Heditri Rahmwati, C. Novian Satria. Iklim kerja di JPD sendiri sudah baik hal tersebut terbukti dari adanya komunikasi dan interaksi yang bagus antar karyawan. Komunikasi antara kepala bagian dengan staff juga baik. Kepala bagian memberikan intruksi yang dapat diterima oleh staff. Kerjasama antar anggota juga baik hal tersebut dibuktikan dengan masing-masing staff sudah mempunyai *job desk* masing-masing tetapi mereka membantu karyawan yang lain apabila pekerjaannya masih banyak. Di JPD apabila ada masalah dibicarakan secara terbuka dan dicari penyelesaiannya bersama, mereka melakukan sharing di sela-sela pekerjaan atau sebelum pulang kantor. Karna

tugas mereka di bagian Jaminan Pendidikan Daerah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat yang kurang mampu, sikap mereka baik bila menerima tamu. Berdasarkan wawancara dengan staf JPD bahwa mereka merasa senang dan puas karna dapat melayani masyarakat yang kesusahan. Program yang ada di JPD antara lain JPD (beasiswa presatasi, beasiswa kelurahan, KMS), BOSDA dan PIP.

Mahasiswa tertarik dengan Program Indonesia Pintar karena program ini merupakan kelanjutan program Beasiswa Siswa Miskin. Dimana sasaran program ini adalah anak dari keluarga yang kurang mampu. Meskipun demikian program ini mengalami masalah diantaranya keterlambatan pencairan dana, kurang tepat sasaran dan sulitnya pengawasan penggunaan dana. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti “Implementasi Program Indonesia Pintar di SMA N 9 dan 10 Yogyakarta.”

B. Perumusan Program Kegiatan dan Rancangan Kegiatan PPL

Berdasarkan hasil analisa situasi dari kegiatan observasi maka akan dirumuskan sebuah program kegiatan penelitian. Adapun judul yang saya ambil yaitu “Implementasi Program Indonesia Pintar di SMA N 9 dan 10 Yogyakarta”. Program kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan PIP melalui KIP di SMA N 9 dan 10 Yogyakarta. Kegiatan yang akan dilakukan dalam program ini meliputi observasi, wawancara dengan pengelola PIP Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, pengelola PIP SMAN 9 Yogyakarta dan pengelola PIP SMAN 10 Yogyakarta. Hasil dari program ini semoga dapat dijadikan bahan bagi Dinas dan sekolah untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Indonesia Pintar dan bagi mahasiswa dapat meningkatkan kompetensi yang sesuai dengan kompetensi jurusan Kebijakan Pendidikan yaitu peneliti dan networking.

Rancangan Kegiatan PPL yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif menggunakan manusia sebagai instrumen penelitian dan berlatar alamiah. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif kualitatif, karena tujuan penelitian untuk mendeskripsikan proses atau alur yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk kata-kata verbal. Yang mejadi subjek dan objek penelitian adalah pengelola PIP Dinas Pendidikan Kota, pengelola PIP SMA N 9 Yogyakarta, dan pengelola PIP SMAN 10 Yogyakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Untuk mendapatkan

data peneliti menggunakan pedoman wawancara dan dokumen. Untuk menguji data dari subjek valid atau tidak maka peneliti menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dimana analisis data tersebut dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, display data dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan.

BAB II

PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL

A. Persiapan Pelaksanaan Program

Persiapan dimulai dengan observasi selama satu minggu di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta bagian UPT JPD. Selain melakukan observasi di UPT JPD, mahasiswa juga melakukan wawancara dengan Kepala Bidang maupun dengan karyawan JPD. Hasil dari observasi dan wawancara ini digunakan untuk merumuskan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan di PPL II.

Setelah melakukan observasi selama satu minggu di Dinas Pendidikan UPT JPD mahasiswa melakukan persiapan pembuatan proposal penelitian. Dalam pembuatan proposal itu mahasiswa bersama dengan dosen pembimbing lapangan melakukan diskusi. Selain diskusi dengan dosen pembimbing lapangan peneliti juga diskusi dengan pihak UPT JPD Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Pihak UPT juga memberikan pengarahan bila mengambil judul implementasi maka nanti yang diteliti adalah proses dari pelaksanaan tersebut. Setelah berdiskusi dengan Kepala bidang JPD, mahasiswa berdiskusi dengan pengelola PIP. pengelola PIP memberikan masukan fokus masalah diganti saja tetapi mahasiswa memberikan alasan bahwa laporannya nanti tidak akan hanya proses pelaksanaan saja melainkan juga masalah-masalah yang ada akan dicantumkan.

Selanjutnya mahasiswa membuat instrumen atau alat penelitian untuk mempermudah proses pelaksanaan penelitian. Instrumen yang dibuat adalah pedoman wawancara dan dokumen. Instrumen tersebut digunakan untuk mengumpulkan data. Berikut pedoman wawancara yang disusun oleh mahasiswa:

1. Bagaimana program tersebut dikomunikasikan kepada masyarakat dan sekolah?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh sekolah dan Dinas agar pelaksanaan PIP berjalan efektif dan efisien?
3. Apa saja faktor pendukung pelaksanaan PIP di sekolah?
4. Apa yang menjadi hambatan atau tantangan dalam melaksanakan PIP di sekolah?
5. Bagaimana sekolah mengatasi hambatan atau tantangan tersebut?

Untuk memperkuat penelitian mahasiswa membutuhkan teori untuk menjadi dasar dalam penelitian. Teori-teori yang dikumpulkan juga akan mempermudah

ketika penyusunan laporan. Adapun teori-teori yang digunakan sebagai dasar antara lain:

A. Implementasi Kebijakan Pendidikan

Kebijakan merupakan usaha yang dilakukan oleh sebuah lembaga atau institusi dalam rangka mengatasi suatu masalah. Kebijakan berkaitan dengan pengambilan keputusan dimana keputusan tersebut hendaknya didasarkan pada hasil riset dan pengembangan. Kebijakan lahir melalui proses yang panjang. Menurut Andersen dkk proses kebijakan meliputi agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi dan evaluasi. Untuk Indonesia rencana 20% keberhasilan, implementasi 60% dan 20% adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat dikarenakan masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep muncul di lapangan. Berikut beberapa teori implementasi kebijakan:

1. Teori Van Meter dan Van Horn

Teori ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan linier dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi, karakteristik dari agen pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik serta kecenderungan dari pelaksana..

2. Teori Elmore.

Teori ini dimulai dari mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada aktor tersebut mengenai tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang dimiliki.

3. Teori Edward

Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif antara lain *communication*, *resource*, *disposition or attitude* dan *bureaucratic structure*. Komunikasi berhubungan dengan bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada organisasi atau publik, *resource* berkaitan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, *disposition* berkaitan dengan kesiapan dan kesediaan untuk melaksanakan kebijakan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi. (HAR Tillaar)

Berdasarkan teori di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan implementasi adalah kegiatan pelaksanaan suatu kebijakan atau program yang memperhatikan syarat dari teori Edward dan teori Elmore. Implementasi harus melihat dari aktor yang melaksanakan kebijakan tersebut, tujuan, strategi dan hasil

yang akan dicapai seperti apa nantinya. Selain itu pelaksanaan akan berhasil apabila ada komunikasi, ketersediaan sumberdaya pendukung, kesiapan dan kesediaan untuk melaksanakan kebijakan dan struktur birokrasi yang ada.

B. Program Indonesia Pintar

1. Pengertian Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar merupakan program beasiswa dan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu. Program Indonesia pintar sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014, yang mengamanatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Implementasi PIP merupakan kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sekaligus untuk mendorong implementasi Pendidikan Menengah Universal/ rintisan wajib belajar 12 tahun. PIP menjangkau siswa dari jalur pendidikan formal (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) dan non formal (SKB/PKBM, Lembaga Kursus dan Pelatihan). Tujuan dari program ini antara lain: meningkatkan akses bagi anak usia 6-21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi, menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan sekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/ Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/ Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/ lembaga kursus dan pelatihan (LKP)/ Balai Latihan Kerja (BLK) atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

http://dindik.babelprov.go.id/sites/default/files/file_attach/Juknis%20PIP.pdf

2. Sasaran Program Indonesia Pintar

Sasaran PIP adalah anak yang berusia 6 sampai 21 tahun yang merupakan:

- a. Penerima BSM 2014 pemegang KPS,
- b. Siswa anak dari keluarga pemegang KPS/KKS?KIP yang belum menerima BSM tahn 2014,
- c. Siswa/ anak dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan,
- d. Siswa/anak yang berstatus yatim/piatu/yatim piatu dari panti sosial /panti asuhan,
- e. Siswa/anak yang terkena dampak bencana alam,

- f. Anak usia 6-21 tahun yang tidak bersekolah (drop out) yang diharapkan kembali bersekolah,
- g. Siswa/anak dari keluarga miskin/ rentan miskin yang terancam putus sekolah atau siswa/anak dengan pertimbangan khusus lainnya seperti kelainan fisik, korban musibah, dari orangtua PHK, di daerah konflik dan keluarga terpidana berada di LAPAS, memiliki lebih dari tiga saudara yang tinggal serumah,
- h. SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang pertanian (bidang agrobisnis, agroteknologi), Perikanan, peternakan, kehutanan dan pelayaran/kemaritiman,
- i. Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

3. Besaran dana Program Indonesia Pintar

Besaran dana PIP tahun 2015 adalah sebagai berikut:

a. Jenjang SD/Paket A

- siswa kelas I, II, III, IV dan V tahun ajaran 2014/2015 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp450.000,-.
- siswa kelas VI tahun ajaran 2014/2015 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp225.000,-.
- Siswa kelas I tahun ajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp225.000,-

b. Jenjang SMP/Paket B

- Siswa kelas VII dan VIII tahun ajaran 2014/2015 diberikan dana sebesar Rp750.000,-.
- Siswa kelas XI tahun ajaran 2014/2015 diberikan dana sebesar Rp375.000,-.
- Siswa kelas VII tahun ajaran 2015/2016 diberikan dana sebesar Rp375.000,-.

c. Jenjang SMA/Paket C

- Siswa kelas X dan XI tahun ajaran 2014/2015 diberikan dana sebesar Rp1.000.000,-
- Siswa kelas XII tahun ajaran 2014/2015 diberikan dana sebesar Rp500.000,-.
- Siswa kelas X tahun ajaran 2015/2016 diberikan dana sebesar Rp500.000,-

d. Jenjang SMK

- Siswa kelas X dan XI tahun ajaran 2014/2015 diberikan dana sebesar Rp1.000.000,-
- Siswa kelas XII tahun ajaran 2014/2015 diberikan dana sebesar Rp500.000,-.
- Siswa kelas X tahun ajaran 2015/2016 diberikan dana sebesar Rp500.000,-

4. Prinsip pelaksanaan Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien yaitu diusahakan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang singkat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. efektif, harus sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberi manfaat yang besar sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- c. transparan artinya menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP
- d. akuntabel, pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan
- e. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional.
- f. manfaat, pelaksanaan program atau kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.

C. Implementasi Program Indonesia Pintar

Implementasi Indonesia Pintar berarti pelaksanaan program beasiswa dan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut dengan PIP dilaksanakan dengan melibatkan instansi antara lain tingkat sekolah/SKB/PKBM/LKP/BLK atau satuan pendidikan nonformal lainnya, dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi. Direktorat teknis dan lembaga penyalur. Mekanisme pelaksanaan PIP meliputi:

1. Mekanisme Pengusulan, pengusulan penerima dana BSM/PIP dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - (a) Untuk peserta didik dari keluarga pemegang KPS atau KKS atau KIP, Untuk siswa sekolah formal, sekolah mengentri (*updating*) data siswa (nomor KPS/KKS/KIP) calon penerima PIP 2015 dari keluarga pemegang KPS/KKS/KIP ke dalam aplikasi Dapodik secara benar dan lengkap. Data ini sekaligus berfungsi sebagai data usulan siswa calon penerima dari tingkat sekolah ke dinas pendidikan kabupaten/kota dan direktorat teknis.
 - (b) Peserta Didik Yang Tidak Memiliki KPS/KKS/KIP baik siswa sekolah formal maupun anak didik dari SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya dari keluarga miskin/rentan miskin yang tidak memiliki KPS/KKS/KIP, dapat diusulkan oleh sekolah/lembaga pendidikan nonformal setelah siswa/anak dari keluarga pemilik KPS/KKS/KIP ditetapkan sebagai penerima BSM/PIP2015 pada tenggat waktu yang akan ditentukan kemudian, dengan mekanisme sebagai berikut: (a). Sekolah/SKB/PKBM/LKP/BLK atau satuan pendidikan nonformal lainnya menseleksi dan menyusun daftar siswa/anak didik yang tidak memiliki

KPS/KKS/KIP sebagai calon penerima dana BSM/PIP 2015 berdasarkan alokasi sementara sasaran per kabupaten/kota yang ditetapkan oleh direktorat teknis dengan prioritas tertentu; (b) Sekolah mengusulkan siswa hasil seleksi sebagai penerima PIP 2015 melalui aplikasi Verifikasi Indonesia Pintar (VIP) yang tersedia di laman: pip.kemdikbud.go.id ke dinas pendidikan kabupaten/kota; (c) Dinas pendidikan kabupaten/kota memberikan persetujuan dan selanjutnya menyampaikan/meneruskan ke direktorat teknis terkait daftar/usulan siswa/peserta didik calon penerima BSM/PIP 2015 (dari sekolah formal maupun lembaga pendidikan non formal). Data ini merupakan usulan siswa calon penerima dari tingkat sekolah ke direktorat teknis.

2. **Mekanisme penetapan penerima**, mekanisme penetapan penerima dana PIP dilaksanakan melalui mekanisme berikut:

- (a) Direktorat teknis menerima usulan calon siswa penerima PIP dari dinas pendidikan kabupaten/kota/pemangku kepentingan.
- (b) Direktorat teknis menetapkan siswa penerima PIP yang berasal dari usulan sekolah yang telah disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan usulan dari pemangku kepentingan dalam bentuk surat keputusan (SK) direktur teknis yang bersangkutan. Untuk usulan SMK yang berada dibawah binaan propinsi, pengesahan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

3. **Mekanisme Penyaluran**, mekanisme penyaluran meliputi:

- Direktorat teknis menyampaikan daftar penerima BSM/PIP 2015 yang tercantum dalam surat keputusan direktur ke lembaga penyalur untuk dibuatkan rekening.
- Direktorat Teknis mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan surat keputusan direktur.
- KPPN menyalurkan dana sesuai SP2D ke rekening penyalur atas nama direktorat teknis di lembaga penyalur.
- Direktorat teknis menyampaikan Surat Perintah Pemindah bukuan (SP2N) kepada lembaga penyalur untuk menyalurkan/ memindahbukukan dana dari rekening penyalur langsung ke rekening penerima. Teknis penyaluran dana diatur dalam perjanjian kerjasama antara direktorat teknis dengan lembaga penyalur.
- Direktorat teknis menginformasikan daftar siswa penerima kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dengan melampirkan surat keputusan penerima.

- Peserta didik mengambil/mencairkan dana BSM/PIP di lembaga penyalur. Penyaluran dana PIP kepada penerima dilakukan melalui TabunganKu atau virtual account.

4.Mekanisme Pengambilan Dana

Pengambilan atau pencairan dana PIP dilakukan oleh peserta didik di lembaga penyalur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Membawa dokumen berupa surat keterangan kepala sekolah/ketua lembaga, foto copy lembar rapor yang berisi biodata lengkap dengan nama sekolah, NPSN dan NISN serta KTP orangtua/wali (Untuk SD dan SMP). Untuk SMA membawa Kartu pelajar atau identitas pribadi (KTP/KK)
- Menandatangani bukti penerimaan dana BSM/PIP 2015 yang disediakan oleh lembaga penyalur.
- Untuk siswa SD, SMP, dan SMK yang belum memiliki KTP, pengambilan dana beberapa peserta didik harus didampingi minimal satu orang guru/orang tua/wali.
- Bagi penerima PIP yang menggunakan TabunganKu hanya dapat dicairkan oleh bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertulis pada buku tabungan.
- Bagi penerima PIP yang menggunakan *virtual account* dan berada di daerah yang sulit untuk mengakses ke lembaga penyalur (tidak ada kantor lembaga penyalur di kecamatan sekolah/tempat tinggal peserta didik sedangkan biaya transport pengambilan lebih besar dari bantuanyang akan diterima), maka pengambilan dana BSM/PIP 2015 dapat diambil secara kolektif dengan dikuasakan kepada kepala sekolah/ kepala lembaga pendidikan atau bendahara sekolah/bendahara lembaga pendidikan dengan syarat/ketentuan pengambilan kolektif sebagai berikut:
 - Surat kuasa kolektif dari orang tua siswa penerima BSM/PIP 2015 dengan melampirkan dokumen persyaratan pengambilan sesuai ketentuan;
 - Sekolah/lembaga pendidikan menyampaikan surat permohonan pencairan kolektif ke dinas pendidikan kabupaten/kota.
 - Dinas pendidikan kabupaten/kota menerbitkan surat persetujuan pengambilan dana kolektif hanya diberikan kepada sekolah/lembaga pendidikan, tembusan disampaikan kepada direktorat teknis terkait;
 - Kepala sekolah yang telah menerima rekomendasi harus membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) pengambilan dana
 - BSM/PIP 2015 secara kolektif yang ditandatangani penerima kuasa bermaterai (format terlampir);

- Penerima kuasa menunjukkan identitas seperti KTP atau SIM asli pada saat pengambilan dana secara kolektif di lembaga penyalur;
- Surat keterangan kepala sekolah/ ketua lembaga;
- Foto kopi halaman biodata raport masing-masing siswa; Dana yang sudah dicairkan oleh penerima kuasa harus segera diberikan kepada siswa penerima yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pencairan kolektif, dan pelaporan pencairan kolektif dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencairan kolektif ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- Pengambilan dana untuk siswa SD, SMP, dan SMK dapat diambil pada tanggal 5 sampai dengan 24 setiap bulannya;
- Minimal saldo pada rekening tabungan adalah sebesar Rp0,

B. Pelaksanaan Kegiatan PPL

Kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan adalah Implementasi Program Indonesia Pintar di SMA N 9 dan 10 Yogyakarta. Dalam pengumpulan data teknik yang digunakan adalah dengan dokumentasi dan wawancara. Mahasiswa mencari data tentang daftar penerima PIP dan asal sekolah dan Surat Keputusan yang dikeluarkan Kemendikbud dari Pengelola PIP di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Selain itu, mahasiswa juga mewawancarai pengelola PIP Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Dan tanpa sengaja ketika melakukan pelayanan masyarakat, mahasiswa menemukan permasalahan mengenai Kartu Indonesia Pintar. Selanjutnya mahasiswa membuat catatan tentang kasus yang ditemukan tersebut. Selanjutnya mahasiswa melakukan wawancara dengan pengelola PIP di SMA N 9 Yogyakarta. Dan di bulan September mahasiswa melakukan wawancara dengan Pengelola PIP di SMA N 10 Yogyakarta.

Setelah melakukan wawancara mahasiswa kemudian mengolah data. Data yang sudah ada kemudian dipilah-pilah atau dikategorikan sesuai dengan pertanyaan penelitian. Setelah itu data ditampilkan dalam bentuk kata-kata verbal, selanjutnya mahasiswa membuat kesimpulan.

C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi

1. Program/ Kegiatan Individu

a. Penelitian Implementasi Program Indonesia Pintar di SMA N 9 dan 10 Yogyakarta

Pelaksanaan program kegiatan PPI di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta berupa kegiatan penelitian. Penelitian ini diawali

dengan merancang dan menyusun proposal penelitian yang disahkan oleh DPL dan pembimbing di lembaga. Penelitian yang dilakukan berjudul “Implementasi Program Indonesia Pintar di SMA N 9 dan 10 Yogyakarta”. Latar belakang penelitian ini adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) keluarga yang mampu secara ekonomi secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan APK keluarga tidak mampu. Salah satu alasannya adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik. Biaya langsung peserta didik antara lain iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik antara lain biaya transportasi, kursus, uang saku dan biaya lain-lain. Tingginya biaya pendidikan tersebut menyebabkan tingginya angka tidak melanjutkan sekolah dan tingginya angka putus sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan PIP di sekolah. Adapun analisis hasil penelitian adalah sebagai berikut:

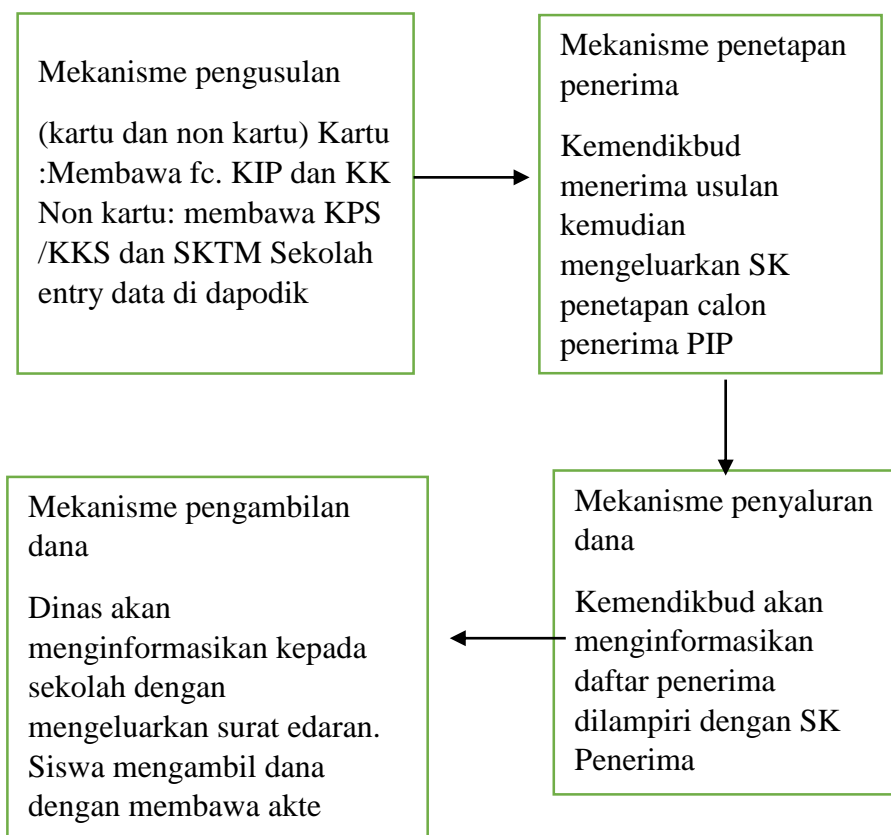
Program Indonesia Pintar merupakan pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu. Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar merupakan kelanjutan dari BSM. Penyelenggara PIP melalui KIP adalah Kemendikbud. KIP diberikan sebagai identitas untuk menjamin atau memastikan seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan PIP.

Tujuan dari program ini antara lain: meningkatkan akses bagi anak usia 6-21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi, menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan sekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/ Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/ Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/ lembaga kursus dan pelatihan (LKP)/ Balai Latihan Kerja (BLK) atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

Sasaran PIP yaitu siswa yang mempunyai KIP, Kartu Perlindungan Sosial (KPS); siswa yatim, piatu, yatim piatu; korban

bencana alam; anak panti asuhan; anak berkebutuhan khusus. Dana bantuan PIP digunakan untuk memenuhi kebutuhan personal siswa seperti membeli alat perlengkapan sekolah.

Untuk tahun 2016 pengusulan PIP melalui KIP dapat dilakukan melalui jalur kartu dan non kartu. Kartu Indonesia Pintar diperoleh melalui sistem, penentuan yang berhak mendapat KIP berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik saat pendataan penduduk. Program Indonesia Pintar dikomunikasikan melalui sosialisasi ke sekolah. Media yang digunakan berupa brosur dan buku panduan. Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar dilaksanakan dengan alur sebagai berikut:



Program Indonesia Pintar disosialisasikan kepada masyarakat dan sekolah pada awal tahun 2015. Respon masyarakat dengan adanya PIP adalah sangat antusias dan berusaha memahami apa itu program PIP. Beberapa masyarakat penerima cukup senang ketika dana dapat dicairkan untuk membeli kebutuhan personal siswa sekolah dan mengurangi angka putus sekolah. Sumber daya yang mendukung pelaksanaan program ini adalah adanya komunikasi dan koordinasi antar lembaga (Dinas, sekolah dan masyarakat).

Hambatan atau masalah selama pelaksanaan PIP adalah pertama distribusi KIP. Seharusnya KIP sudah selesai didistribusikan kepada yang bersangkutan pada bulan Mei 2016. KIP langsung didistribusikan kepada yang bersangkutan melalui pihak ketiga, akan tetapi KIP lewat kelurahan. Kedua, kesalahan identitas pada kartu misal jenis kelamin, tanggal lahir. Ketiga, 1 anak mendapatkan dua kartu, tetapi berbeda nama atau tanggal lahirnya. Keempat, ada sekolah yang menyuruh wali murid untuk melegalisir KIP di Dinas Pendidikan padahal Dinas tidak melayani legalisir KIP. Kelima, ada wali murid yang mendapat PIP lewat legislasi meminta Dinas untuk mengeluarkan nomor virtual account. Nomor virtual account akan ada dalam SK yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Keenam, terdapat beberapa penerima PIP yang salah sasaran. Dikarenakan basis data dari Kemensos Pusat dan Badan Pusat Statistik. Sehingga ada siswa yang beberapa tahun lalu didata sebagai keluarga kurang mampu, tapi saat menerima dana PIP sudah menjadi keluarga yang berkecukupan.

Solusi mengatasi masalah kesalahan identitas kartu adalah pihak Dinas meminta masyarakat untuk memfotokopi KIP dan KK kemudian distabilo dan dikumpulkan ke sekolah, hal ini dimaksudkan ketika entry data di aplikasi data akan valid. Untuk pembenaran kartu pemerintah belum memiliki alat. Untuk mengatasi masalah ketepatan sasaran adalah dari pihak sekolah berperan dalam ketika pengusulan berdasarkan KPS dan SKTM. Karena sekolah harus benar-benar memilih setiap siswa yang berhak diusulkan menjadi calon penerima PIP. Mengatasi masalah legalisasi KIP, Dinas mensosialisasikan bahwa Dinas dan kelurahan tidak melayani legalisir KIP.

(1) Implementasi Program Indonesia Pintar melalui KIP di SMAN 9 Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Program Indonesia Pintar dikomunikasikan ke sekolah lewat Dinas pendidikan Kota Yogyakarta kemudian sekolah mensosialisasikan ke siswa melalui wali kelas. Mekanisme pengusulan dapat dilakukan di sekolah dengan membawa fotocopy Kartu Indonesia Pintar dan Kartu keluarga sedangkan yang belum memiliki kartu dapat diusulkan lewat jalur non kartu dengan membawa KKS/KPS dilampiri dengan Surat Keterangan Tidak

Mampu. Sekolah akan mengentri data dalam sistem dapodik. Setelah pengusulan Kemendikbud akan mengeluarkan SK penetapan calon penerima PIP. Kemudian Dinas pendidikan akan menginformasikan kepada sekolah mengenai SK tersebut. Setelah itu Kemendikbud akan mengeluarkan SK penyaluran dana disertai dengan daftar penerima dan Dinas akan menginformasikan pada sekolah waktu pengambilan dana. Siswa mengambil dana pada bank penyalur (BNI) dengan membawa surat keterangan dari sekolah dan akte kelahiran atau identitas pribadi lainnya. Besaran dana yang diterima oleh siswa SMA/SMK adalah 500.000/semester. Dana PIP digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah seperti buku, tas, sepatu dan keperluan personal siswa lainnya.

Faktor pendukung pelaksanaan PIP di SMAN N 9 Yogyakarta adalah sumberdaya manusia yang handal dan adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara sekolah dan Dinas terkait dengan pengusulan, pencairan dana dan pemantauan penggunaan dana PIP. Faktor penghambat pelaksanaan PIP di SMAN 9 Yogyakarta adalah validitas data. Dimana sebenarnya masyarakat itu ada yang kurang mampu tetapi belum terdaftar dalam penerima bantuan. Sekolah kesulitan mengetahui yang berhak mendapatkan PIP. Masalah yang muncul dalam pelaksanaan PIP adalah ketepatan penerima sasaran tadi dikarenakan data yang kurang valid. Solusi yang digunakan untuk mengatasi hal tersebut adalah sekolah berusaha mendata ulang siswa secara valid dengan meminta bantuan dari PSM (Pegawai Sosial masyarakat) di kelurahan.

(2) Implementasi Program Indonesia Pintar di SMA N 10 Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Program Indonesia Pintar melalui KIP disosialisasikan ke siswa melalui surat edaran atau pemberitahuan kepada seluruh siswa. Besaran dana yang diterima siswa untuk tingkat SMA adalah 500.000 persemester. Mekanisme pengusulan dapat dilakukan di sekolah dengan membawa fotocopy Kartu Indonesia Pintar dan Kartu keluarga sedangkan yang belum memiliki kartu dapat diusulkan lewat jalur non kartu dengan membawa KKS/KPS dilampiri dengan Surat Keterangan Tidak Mampu. Sekolah akan mengentri data dalam sistem dapodik. Setelah pengusulan Kemendikbud akan mengeluarkan SK penetapan calon penerima PIP. Kemudian Dinas

pendidikan akan menginformasikan kepada sekolah mengenai SK tersebut. Setelah itu Kemendikbud akan mengeluarkan SK penyaluran dana disertai dengan daftar penerima dan Dinas akan menginformasikan pada sekolah waktu pengambilan dana. Siswa mengambil dana pada bank penyalur (BNI) dengan membawa surat keterangan dari sekolah dan akte kelahiran atau identitas pribadi lainnya.

Faktor pendukung pelaksanaan PIP di SMAN 10 Yogyakarta adalah adanya kerjasama, komunikasi dan koordinasi baik secara internal maupun eksternal. Pihak sekolah berusaha aktif memberikan sosialisasi serta arahan kepada siswa tentang penggunaan dana PIP. Yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan PIP adalah ada beberapa siswa yang belum memiliki KIP atau memiliki tapi tidak tahu, dan kekurangan berkas sehingga sekolah harus menunggu, ini mengakibatkan keterlambatan dalam pengusulan siswa.

Masalah yang dihadapi SMA N 10 Yogyakarta adalah kesulitan dalam mengontrol penggunaan dana PIP dikarenakan dana PIP langsung masuk ke rekening pribadi siswa. Solusi yang diberikan adalah sekolah selalu memberikan informasi tentang penggunaan dana PIP ke siswa dan siswa juga disuruh membaca rambu-rambu penggunaan dana PIP.

Refleksi:

Mahasiswa menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward dan Elmore. Dimana teori ini menjadi dasar dalam perumusan pertanyaan penelitian dan alur daripada penjabaran pembahasan. Hal yang urgent untuk ditindaklanjuti adalah mengenai ketepatan sasaran penerima PIP dan juga pengawasan terhadap penggunaan dana PIP. Tepat atau tidaknya sasaran PIP sangat bergantung dari valid atau tidaknya data yang diperoleh BPS saat pendataan penduduk. Oleh karenanya sekolah harus benar-benar cermat dan tepat dalam memilih siswa yang berhak diusulkan sebagai penerima PIP. Yang kedua mengenai pengawasan penggunaan dana PIP. Dana PIP sebenarnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan personal siswa seperti membeli buku, tas, sepatu dan lain-lain. Akan tetapi berdasarkan cerita dari pengelola

PIP di SMA N 10 Yogyakarta dana PIP terkadang dimanfaatkan untuk membeli handphone dan baju. Selama ini pengelola PIP tidak dituntut untuk membuat SPJ atau LPJ sehingga penggunaan dana PIP kurang dapat dipertanggungjawabkan. Agar PIP dapat berjalan efektif dan efisien hal pertama yang perlu diperhatikan adalah ketepatan penerima PIP. Data dari BPS hendaknya disinkronkan dengan data yang dimiliki sekolah khususnya mengenai data siswa dari keluarga kurang mampu.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Program Indonesia Pintar melalui KIP disosialisasikan kepada masyarakat dan sekolah pada awal tahun 2015. Dinas Pendidikan Yogyakarta melakukan sosialisasi dengan cara mengundang sekolah dan masyarakat. Untuk SMA N 9 Yogyakarta disosialisasikan lewat wali kelas atau guru kelas sedangkan untuk SMA N 10 Yogyakarta sosialisasi dilakukan dengan surat edaran atau pemberitahuan kepada seluruh siswa.
2. Proses atau mekanisme PIP meliputi mekanisme pengusulan, penetapan penerima, penyaluran dan pengambilan dana. Untuk pengusulan siswa membawa KIP dan KK, apabila tidak mempunyai dapat mengusulkan dengan membawa KPS dan SKTM setelah itu sekolah mengentri di dapodik sekolah. Setelah diusulkan, Kemendikbud akan menetapkan siswa calon penerima PIP dengan SK. Setelah itu, Kemendikbud akan menginformasikan kepada Dinas mengenai daftar penerima PIP disertai surat keputusan penerima. Selanjutnya Dinas akan menginformasikan kepada sekolah untuk pengambilan dana PIP. Siswa datang ke bank penyalur yang ditunjuk (BNI) dengan membawa surat keterangan dari sekolah dan akte kelahiran atau dokumen pribadi yang lain.
3. Sumber daya pendukung yang diperlukan adalah data yang valid, sumber manusia yang handal dan terampi.
4. Faktor pendukung pelaksanaan PIP adalah adanya komunikasi, kerjasama serta koordinasi antar instansi. Faktor penghambat adalah keterlambatan distribusi KIP.
5. Masalah yang muncul di masyarakat adalah kesalahan identitas kartu, satu anak mendapat 2 kartu, legalisir KIP, dan meminta nomor virtual account, sedangkan masalah yang terjadi di tataran sekolah adalah ketepatan sasaran, sekolah kesulitan mengontrol penggunaan dana, validitas data.
6. Solusi yang diberikan adalah sebagai berikut:
 - a. Ketika pengusulan berdasarkan KPS dan SKTM, sekolah harus benar-benar memilih setiap siswa yang berhak diusulkan menjadi calon penerima PIP.

- b. Bekerjasama dengan pegawai sosial masyarakat tentang pendataan siswa yang kurang mampu.
- c. Menginformasikan kepada siswa bahwa dana PIP digunakan untuk membeli keperluan sekolah

B. REKOMENDASI

1. Untuk mengatasi masalah yang kurang tepat sasaran sekolah dibantu dengan PSM (Pegawai Sosial Masyarakat) melakukan pendataan tentang keluarga yang kurang mampu agar didapat data yang valid.
2. Untuk mengatasi penggunaan dana sekolah terus menerus melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana PIP semisal mengadakan pertemuan dengan wali murid.

DAFTAR PUSTAKA

Riant Nugroho dan HAR Tilaar. 2008. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Google. 2015. Petunjuk teknis pelaksanaan PIP tersedia di [:http://dindik.babelprov.go.id/sites/default/files/file_attach/Juknis%20PIP.pdf](http://dindik.babelprov.go.id/sites/default/files/file_attach/Juknis%20PIP.pdf) diakses pada hari Rabu tanggal 20 bulan April tahun 2016 pukul 13:40 WIB.